

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- A Siti Soetami; *Hukum Administrasi Negara II*; (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; 1990).
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2006)
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1991).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Cheppy Haricahyono. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- Christopherus Wahyu Haryo Priyo Sasongko. Mahasiswa Administrasi Negara dan Aktifis PMKRI, *Transformasi Desain sistem Kepegawaian di Indonesia*, Majalah Opini Fisip UNDIP Semarang Edisi 27/XV/2000.
- Dolet Unaradjan; *Manajemen Disiplin*; (Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia; 2003).
- Eddy Suwardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen Operasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- Hj. Retno Sri Harini, *Tata Cara Pemeriksaan dan BAP, disampaikan Pada Orientasi Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis Administrasi Kepegawaian dari empat Lingkungan Peradilan Tingkat Bandung dan Tingkat Pertama kelas I.A Seluruh Indonesia tahun Anggaran 2007; Cilegon, 3-6 Desember 2007*.
- Kristian Widya Wicaksono; *Administrasi Dan Birokrasi Indonesia*; (Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu; 2006).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- M. Suparno; *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*; (Jakarta; PT. Pural Mundial; 1992).
- Marsono; *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*
- Moh Mahfud MD; *Hukum Kepegawaian Indonesia*; (Yogyakarta; Liberty, 1988).
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

- P.Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Pheni Chalid, *Otonomi Daerah (Masalah, Pemberdayaan, Konflik)*, (Jakarta: Kemitraan, 2005)
- Puspa Delima, M. Djadiono dan H. Anton Djawamaku. *Studi tentang Politik Lokal pada Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Centre For Strategic And International Studies, 2001).
- R. Nainggolan. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1987).
- Riyadi Soeprapto, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*, (Jakarta: Habibie Center, 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Rozali Abdulah; *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Soegeng Prijodarminto; *Disiplin Kiat Menuju Sukses*; (Bandung; Pradnya Pramita; 1994).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).
- Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sondang P Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995).
- Sudibyo Triatmodjo. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid I*; (Yogyakarta: Andi Offset, 1998).
- Taliziduhu Ndraha. *Research Teori Metodologi Administrasi*. (Jakarta: Bina Aksara, 1995).
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir; *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*; (Jakarta; PT. Rineka Cipta; 1994); hlm. 153.
- Winardi; *Asas–Asas Manajemen*; (Bandung; Alumni, 1994).

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2000